

### ESKATOLOGI ERA REFORMASI INDONESIA: PEMBACAAN POSKOLONIAL TERHADAP WAHYU 21-22:5 DALAM MEMIKIRKAN ESKATOLOGI DARI INDONESIA

Christo Antusias Davarto Siahaan

STT Aletheia

siahaanchristo4@gmail.com

#### Article History

Submitted  
June 1<sup>st</sup>, 2021

Revised  
July 28<sup>th</sup>, 2021

Accepted  
July 30<sup>th</sup>, 2021

#### Keyword

*Postcolonial,  
Eschatology, Indonesia,  
Pancasila, Reformation.*

*Poskolonial, Eskatologi,  
Indonesia, Pancasila,  
Reformasi.*

**Abstract:** *Eschatology is an essential concept in New Testament studies with great complexity, debate, and significance. However, the studies are dominated by western context and traditions. Applying the Postcolonial Criticism method of scripture on the text of Revelation 21-22 and Indonesian reformation context, this article shows that it is possible to construct an Indonesian Eschatology that stresses the people's hope. In conclusion, this article highlights that God will resolve any oppressions and corruptions in Indonesia, making the country prosper.*

**Abstrak:** Eskatologi adalah sebuah konsep yang sangat penting dalam studi Perjanjian Baru dengan kompleksitas, perdebatan dan signifikansi yang besar. Namun demikian, studi eskatologi lebih banyak didominasi oleh konteks dan tradisi Barat. Dengan menerapkan metode Kritik Poskolonial terhadap Wahyu 21-22:5 dalam konteks reformasi di Indonesia, artikel ini menunjukkan bahwa mungkin untuk membentuk eskatologi khas Indonesia yang menekankan pengharapan umat Indonesia. Di bagian kesimpulan, artikel ini menggarisbawahi bahwa Allah akan membebaskan Indonesia dari penindasan dan korupsi, serta membuat bangsa ini hidup dalam kesejahteraan.

## PENDAHULUAN

Eskatologi adalah sebuah konsep yang sangat penting dalam studi Perjanjian Baru, karena memiliki kompleksitas, perdebatan dan signifikansi yang besar.<sup>1</sup> Dengan demikian, wajarlah jika di dalam gereja dan studi biblika pemahaman eskatologisnya sangat beragam, bahkan diperdebatkan.

Dalam studi Biblika dua abad terakhir, konsep eskatologi di dalam Perjanjian Baru sangatlah beragam. Tokoh-tokoh besar yang terlibat di dalamnya antara lain Karl Barth, Jürgen Moltmann, James Dunn, Richard Bauckham, Rudolf Bultmann dan lain sebagainya.<sup>2</sup> Semua tokoh tersebut menawarkan konsep eskatologi yang berasal dari konteks Barat.<sup>3</sup>

Eskatologi yang berasal dari konteks Barat tersebut secara umum berfokus pada beberapa hal. Pertama, konflik atau dinamika antara masa sekarang yang dihidupi oleh manusia dengan masa depan. Dalam pemikiran eskatologisnya, C. H. Dodd menjelaskan konsep *realized eschatology* sebagai eskatologi di masa depan yang diwujudkan mulai dari masa sekarang.<sup>4</sup> Kedua, berfokus pada perkembangan studi mengenai Yesus historis dalam *The Third Quest*, seperti Brand Pitre yang meneliti eskatologi dari perkembangannya di Yudaisme Bait Allah Kedua untuk mengerti bagaimana Yesus sendiri memahami konsep eskatologi.<sup>5</sup> Ketiga, menekankan etika sosial, seperti Jürgen Moltmann yang beranggapan bahwa akhir zaman ialah kedatangan Kristus yang dapat dipercepat dengan partisipasi politik orang-orang Kristen.<sup>6</sup> Keempat, membangun eskatologi dari rekonstruksi metanarasi Perjanjian Baru, seperti N. T. Wright yang membangun eskatologi dari narasi biblis dengan dengan memerhatikan konteks para penulis Perjanjian Baru.<sup>7</sup>

Dalam diskusi eskatologis yang berorientasi Barat, konteks-konteks non-Barat kurang mendapatkan tempat. Mitchel menjelaskan bahwa studi eskatologi

---

<sup>1</sup> Paul Mitchel, "New Testament Eschatologies," in *The State of New Testament Studies: A Survey of Recent Research*, ed. Scott L Mcknight and Nijay K Gupta (Michigan: Baker Academic, 2019), 224.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 228-248.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 247.

<sup>4</sup> C. H Dodd, *The Parables of the Kingdom* (London: The Religious Book Club, 1935), 198.

<sup>5</sup> Brant Pitre, *Jesus, the Tribulation and the End of Exile: Restoration Eschatology and the Origins of the Atonement* (Tubingen: Mohr Siebeck, 2005), 31-48.

<sup>6</sup> Jürgen Moltmann, *Theology of Hope: On the Ground and the Implications of a Christian Eschatology*, ed. James W Leitch (New York: Harper & Row Publishers, 1977), 230-338.

<sup>7</sup> Nicholas Thomas Wright, *Paul and the Faithfulness of God: Part III and IV* (London: Fortress Press, 2013), 1128-1256.

yang dipertemukan dengan konteks kehidupan non-Barat pada zaman sekarang seperti politik, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hal yang baik dan sangat diharapkan. Hal ini karena eskatologi, khususnya Perjanjian Baru yang dipertemukan dengan konteks zaman sekarang merupakan karya yang membantu dan memiliki kontribusi terhadap misi dari gereja yang didirikan Tuhan.<sup>8</sup>

Dalam kondisi yang demikian, penulis berupaya untuk menyusun konsep eskatologi dari suara Asia khususnya Indonesia dalam hal politik sebagai konteks zaman sekarang. Konsep eskatologi dari suara Asia berbeda dari eskatologi yang berorientasi pada konteks Barat yang ciri-cirinya telah dijelaskan sebelumnya. Eskatologi ini fokus pada konteks lokal, yaitu Indonesia era reformasi.

Indonesia dipilih karena di sinilah penulis tinggal dan bertumbuh. Selanjutnya, politik dipilih atas dasar fakta bahwa teks Wahyu yang diselidiki di dalam tulisan ini adalah kitab yang memiliki banyak unsur politis di dalamnya seperti yang diungkapkan oleh Stephen D. Moore.<sup>9</sup>

Dalam melakukan penelitian ini, Kritik Poskolonial dari perspektif Indonesia era reformasi digunakan terhadap Wahyu 21-22:5 untuk membangun konsep eskatologi yang dipertemukan dengan konteks politik Indonesia. Kritik Poskolonial digunakan karena kritik ini memakai pengalaman-pengalaman suatu kelompok atau komunitas pembaca dalam membaca teks Alkitab dengan tujuan memahami diri kelompok atau komunitas masing-masing, seperti yang dilakukan oleh kaum hispanik.<sup>10</sup> Dengan demikian, teologi dalam tulisan ini adalah eskatologi Perjanjian Baru dari Wahyu 21-22: 5 dari perspektif Poskolonial era Reformasi membantu semua manusia yang dilayani kembali ke makna, tujuan hidup, dan kemerdekaan diri di hadapan Tuhan yang mereka sembah secara konkret.<sup>11</sup> Selanjutnya, teks Wahyu 21-22:5 dipilih karena dua alasan. Pertama, teks ini menggambarkan kondisi eskatologis atau akhir dari dunia ini yang diubah secara sempurna oleh Allah.

---

<sup>8</sup> Mitchel, "New Testament Eschatologies."250.

<sup>9</sup> Stephen D Moore, "The Revelation to John," in *A Postcolonial Commentary on the New Testament Writings* (New York: T&T Clark, 2009), 436.

<sup>10</sup> Haleluya Timbo Hutabarat, "Pesan Suci Yang Terkontaminasi: Suatu Tinjauan Atas Pendekatan Pascakolonial Sugirharajah Dan Konteks Indonesia," *Gema Teologika: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian* 5, no. 2 (2020): 193.

<sup>11</sup> Robertus Wijanarko, "Poskolonialisme Dan Teologi Kontekstual Di Indonesia," in *Berteologi Baru Untuk Indonesia* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2020), 51.

Mengenai hal ini, David E. Aune dalam tafsirannya terhadap Wahyu menyatakan bahwa di dalam teks ini dunia diubah menjadi sempurna, sehingga kerajaan Allah yang kekal (memiliki aspek politik) didirikan di dalam lingkungan yang sempurna.<sup>12</sup> Kedua, suasana politis dalam teks tersebut sangat kental. Moore, bahkan menyebut Wahyu 21-22: 5 sebagai *The New Metropolis* yaitu sebuah kondisi yang berbeda dan merupakan akhir yang baik dengan mengontraskannya dengan imperium Romawi yang dinilai jahat. Dalam hal ini, Wahyu 21-22: 5 menunjukkan kondisi politik atau politik ala Kristen dengan mengontraskannya dengan kekuasaan Imperial Romawi yang merupakan kekuasaan tirani.<sup>13</sup>

Dari hal-hal yang sudah dijelaskan di atas, maka tulisan ini merupakan upaya untuk menyuarakan eskatologi Indonesia dari Wahyu 21 dengan melihat kondisi politik Indonesia di masa sekarang.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang dipakai untuk melakukan penelitian ini adalah Kritik Poskolonial terhadap teks Kitab Suci yaitu Alkitab. Di dalam Kritik Poskolonial itu sendiri terdapat berbagai varian yang (bisa) digunakan untuk menganalisis teks Alkitab. Hal ini terjadi karena Poskolonial sendiri mirip seperti kritik-kritik Posmodernisme lainnya seperti *Theological Interpretation of Scripture* dan lainnya yang tidak memiliki metodologi yang baku seperti kritik-kritik Alkitab modern, contohnya kritik redaksi dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

Dalam studi kritik poskolonial para ahli menggunakan banyak metode pada waktu menyelidiki teks-teks Alkitab. Ada yang menyelidiki relasi kuasa dan yang tertindas dalam sebuah teks seperti yang dilakukan oleh para ahli di dalam buku *A Postcolonial Commentary on the New Testament Writings*, membandingkannya dengan teks budaya atau mitologi suatu kelompok atau daerah seperti yang dilakukan oleh Yonghan Chung,<sup>15</sup> melihatnya dari kondisi suatu kelompok seperti

---

<sup>12</sup> David E Aune, *Revelation 17-22*, Word Biblical Commentary Vol 53C. (Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1998), 1133.

<sup>13</sup> Moore, "The Revelation to John." 443-444.

<sup>14</sup> Dennis R Edwards, "Hermeneutics and Exegesis," in *The State of New Testament Studies: A Survey of Recent Research*, ed. Scott Mcknight and Nijay K Gupta (Michigan, 2019), 82.

<sup>15</sup> Yonghan Chung, "A Postcolonial Reading of The Great Commision (Matt 28:16-20) with a Korean Myth," *Theology Today* 72, no. 3 (2015): 276–289.

yang dilakukan Yusak B. Setyawan, dan lain sebagainya. Penulis di dalam tulisan ini menggunakan metode seperti yang dilakukan oleh Yusak B. Setyawan.<sup>16</sup>

Dalam aplikasinya, metode Setyawan diterapkan dengan beberapa langkah. Langkah pertama ialah perspektif Poskolonial orang Kristen di Indonesia dengan menjelaskan keadaan politik di Indonesia zaman sekarang. Orang Kristen dipilih karena kitab Wahyu adalah produk orang Kristen dan untuk orang Kristen. Langkah kedua adalah menjelaskan konteks politik dari Wahyu 21-22: 5 dengan kategori atau keadaan dari konteks politik Indonesia pada zaman sekarang. Langkah ketiga adalah menganalisis Wahyu 21-22: 5 dengan cara melakukan eksegesis secara singkat. Langkah keempat adalah menyimpulkan aspek-aspek eskatologis yang dihasilkan dari langkah pertama sampai ketiga. Langkah kelima adalah memberikan contoh penerapan aspek-aspek dari eskatologi tersebut di dalam kehidupan berpolitik di Indonesia.<sup>17</sup>

Langkah-langkah ini menurut penulis menunjukkan bahwa orang Indonesia juga bersuara dan berhak menafsirkan Alkitab. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Sugirtharajah seperti dikutip oleh Edwards bahwa Poskolonial mengeksplorasi siapa yang berhak untuk menafsirkan Alkitab.<sup>18</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Keadaan Politik Indonesia Zaman Sekarang**

Batasan keadaan politik Indonesia pada zaman sekarang di dalam tulisan ini adalah keadaan politik Indonesia di era Reformasi tahun 1998 sampai tahun 2020.

#### ***Pergulatan Menuju Reformasi***

Reformasi merupakan suatu peristiwa besar di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Secara singkat, Reformasi hendak mengoreksi praktik-praktik politik yang terjadi di Indonesia di masa-masa sebelumnya seperti pada zaman Orde Baru.

---

<sup>16</sup> Yusak B Setyawan, "'TUHAN YESUS KRISTUS' Sebagai Diskursus Politik: Suatu Perspektif Poskolonial Terhadap Pernyataan Tuhan Yesus Kristus Dalam Kitab Efesus," *Waskita: Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 4, no. 1 (2012): 1–14.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 2.

<sup>18</sup> Edwards, "Hermeneutics and Exegesis."79.

Emmanuel Gerrit Singgih menyatakan bahwa pembaruan yang dibawa oleh semangat reformasi seharusnya membersihkan segala sesuatu yang mampet dan perlu untuk disegarkan kembali.<sup>19</sup>

Gerakan reformasi sendiri dilatarbelakangi oleh beberapa hal yang dianggap salah oleh para pemikir dan penggiat progresif. Gerakan Reformasi sendiri dikaitkan dengan upaya untuk mengoreksi hal-hal yang salah pada masa sebelumnya yaitu Orde Baru. Orde Baru sendiri adalah masa pemerintahan Indonesia di bawah oleh Presiden Soeharto yang memiliki visi untuk meningkatkan dan menjaga stabilitas ekonomi dan politik di Indonesia.<sup>20</sup>

Selama berkuasanya rezim Orde Baru terdapat beberapa hal buruk. Pertama, penggunaan ideologi Pancasila sebagai pembenaran kekuasaan politis Orde Baru. Kedua, praktik berdemokrasi di Indonesia yang terbilang sangat buruk dan tidak menunjukkan demokrasi. Hal ini terjadi karena rezim Orde Baru merestruktur organisasi politik di Indonesia, sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam dunia politik adalah karena tangan dan pekerjaan rezim Orde Baru. Ketiga, penegakan HAM yang tidak baik, bahkan Orde Baru diklaim menjadi penindas dan pelanggar HAM, seperti yang diungkapkan oleh Geoff Simons ketika ia menyajikan data sejarah mengenai tindakan-tindakan adikara yang dilakukan oleh rezim ini.<sup>21</sup> Keempat dan yang menjadi rahasia umum adalah maraknya praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dalam hal implementasi ideologi Pancasila, rezim Orde Baru mengklaim mengimplementasikan ideologi Pancasila jauh lebih baik dibandingkan pendahulunya yaitu Orde Lama. Lebih lanjut, Orde Baru menyatakan bahwa Orde Lama telah menyelewengkan ideologi Pancasila.<sup>22</sup> Namun demikian, pada praktiknya ideologi Pancasila menjadi sesuatu yang sakral, sehingga setiap orang yang interpretasi Pancasilanya berbeda dari interpretasi negara atau pemerintah

---

<sup>19</sup> Emmanuel Gerrit Singgih, *Iman Dan Politik Dalam Era Reformasi Di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000), 9.

<sup>20</sup> Dwi Gahyono Hadi and Gayung Kusuma, "Propaganda Orde Baru 1966-1980," *Verleden* 1, no. 1 (2012): 40–51.

<sup>21</sup> Simons Geoff, *Indonesia: The Long Oppression* (New York: St. Martin Press, 2000), 12.

<sup>22</sup> Yusak B Setyawan, "Encountering State Ideology: Reading The Bible From An Indonesia Postcolonial Perspective," in *Colonial Contexts and Postcolonial Theologies*, ed. M Brett and J Havea (Macmillan: Pargrave, 2014), 102.

akan dihukum dan lain sebagainya. Ini buruk, karena Pancasila adalah ideologi yang bertujuan untuk menyatukan Indonesia secara politis demi kepentingan seluruh Indonesia.<sup>23</sup> Perlakuan terhadap Pancasila yang dilakukan oleh Orde Baru bertujuan untuk menjaga stabilitas kekuasaan politis Orde Baru.<sup>24</sup> Lebih lanjut, hal ini merupakan bentuk legitimasi bagi pemerintahan otoriter Orde Baru.<sup>25</sup>

Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan terkait interpretasi Pancasila ala rezim Orde Baru. Pertama, ideologi Pancasila menjadi sebuah ideologi yang mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan sosial. Lebih lanjut, hal ini dipropagandakan dengan asas kekeluargaan di dalam semua organisasi dan masing-masing individu yang hidup di Indonesia. Dengan demikian, divisi politik, individu yang memiliki interpretasi yang berbeda atau oposisi terhadap ideologi Pancasila Orde Baru dianggap menciderai identitas bangsa Indonesia.<sup>26</sup> Kedua, interpretasi Orde Baru terhadap Pancasila merupakan sebuah interpretasi yang tertutup dan menghilangkan sumbangsih dari ideologi-ideologi yang lain; oleh karenanya G30SPKI dapat terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa interpretasi tersebut digunakan untuk melanggengkan kekuasaan Orde Baru.<sup>27</sup>

Dalam hal demokrasi, Orde Baru juga menekan demokrasi di Indonesia. Hadi dan Kusuma menyatakan bahwa rezim Orde Baru dengan berbagai wacana dan pembangunannya sebenarnya melakukan sebuah isolasi politik terhadap rakyat Indonesia, sehingga suara rakyat tidak diperdengarkan.<sup>28</sup> Hal ini dilakukan dengan sebuah cara. Dengan membuat beberapa kebijakan. Pertama, partai-partai yang ada harus diawasi oleh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di dalam kegiatan internalnya. Kedua, partai-partai kecil dieliminasi oleh pemerintah. Ketiga, menjadikan Golkar sebagai alat elektorat.<sup>29</sup> Dapat disimpulkan bahwa Orde Baru sangat membatasi demokrasi dan suara rakyat. Dengan demikian, rakyat tidak dapat terlibat aktif di dalam demokrasi.

---

<sup>23</sup> Ibid., 101.

<sup>24</sup> Hadi and Kusuma, "Propaganda Orde Baru 1966-1980." 40.

<sup>25</sup> Edward Aspinall, *Opposing Suharto: Compromise, Resistance and Regime Change in Indonesia* (California: Stanford University Press, 2005). 23.

<sup>26</sup> Ibid., 23.

<sup>27</sup> Colin Brown, *A Short History of Indonesia: The Unlikely Nation?* (Crow Nest: Allen & Unwin, 2003), 201.

<sup>28</sup> Hadi and Kusuma, "Propaganda Orde Baru 1966-1980." 48.

<sup>29</sup> Aspinall, *Opposing Suharto: Compromise, Resistance and Regime Change in Indonesia*. 53.

Dalam hal Hak Asasi Manusia, rezim Orde Baru diklaim telah banyak melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hal ini dibenarkan oleh berbagai peristiwa besar yang terjadi pada masa rezim Orde Baru seperti G30S/PKI, dan lain sebagainya. Orde Baru sendiri memiliki *framework* tiranis yang dikenakan kepada orang-orang yang dianggap melawannya.<sup>30</sup> Fakta tersebut menunjukkan bahwa rezim Orde Baru melakukan pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia yang serius.

### **Reformasi**

Reformasi berusaha untuk mengubah hal-hal buruk tersebut atau yang dinyatakan oleh Gerrit Singgih bahwa reformasi adalah usaha untuk membersihkan yang telah mandek dan memperbaiki yang telah rusak. Reformasi berusaha untuk memperbaiki praktik implementasi Pancasila, demokrasi, dan penegakan Hak Asasi Manusia.

Dalam mengimplementasikan ideologi Pancasila, reformasi mengusung sikap yang baru terhadap Pancasila. Pertama, ideologi Pancasila tetap menjadi *Sole Ideology* Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terdapat paradigma atau interpretasi yang diubah. Setyawan dengan mengutip beberapa tokoh Kristen yang menyatakan bahwa Pancasila harus selalu dievaluasi interpretasinya agar selalu menjawab konteks dan kebutuhan orang-orang Indonesia seperti multikultural, kemiskinan, keadilan sosial dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk memelihara kesatuan dan kebaikan seluruh rakyat Indonesia.<sup>31</sup> Kedua, Pancasila juga harus dapat mengakomodasi berbagai perbedaan dan keberagaman dalam hal agama, ideologi dan lain sebagainya, sehingga kesatuan politis seperti yang diharapkan oleh para bapak negara menjadi nyata di dalam kehidupan bangsa Indonesia.<sup>32</sup>

Dalam hal demokrasi, reformasi memiliki semangat untuk meningkatkan atau mengembalikan suara rakyat, sehingga suara rakyat diperdengarkan kembali.

---

<sup>30</sup> Geoff, *Indonesia: The Long Oppression*. 4-48.

<sup>31</sup> Setyawan, "Encountering State Ideology," 107.

<sup>32</sup> David Bourchier and Vedi R Hadiz, *Indonesian Politics and Society: A Reader* (New York: RoutledgeCurzon, 2003). 296.

Hal ini cukup sukses dilakukan oleh presiden RI ketiga yaitu B. J. Habibie yang mengeluarkan kebijakan yang demokratis. David Bourcher menyatakan bahwa Habibie memberikan beberapa hal yaitu kebebasan pers, kebebasan dari berbagai partai politik yang beragam, pemilihan bebas, dan pengembangan terhadap Parlemen yang telah ada. Dalam hal ini, Habibie terbilang berhasil dalam melakukan demokratisasi di Indonesia.<sup>33</sup> Dengan demikian, semangat reformasi di Indonesia berkaitan erat dengan diperdengarkannya suara rakyat dengan tersedianya ruang bagi rakyat untuk melantangkan suaranya.

Dalam hal penegakan HAM, reformasi memiliki semangat untuk menegakkannya. Hal ini dapat dilihat dari gerakan mahasiswa Indonesia. Gerakan ini menamai diri sebagai gerakan untuk menjunjung moral bangsa. Mereka mengklaim bahwa rezim Orde Baru melakukan berbagai tindak pelanggaran HAM. Dari contoh tersebut, dapat dilihat bahwa reformasi memiliki semangat dalam menunjang HAM.

Reformasi juga memiliki semangat untuk menghapuskan praktik KKN di Indonesia. Hal ini dilakukan oleh gerakan mahasiswa dengan dua cara. Pertama, mendorong perubahan struktur MPR dan DPR, sehingga tidak ada badan yang dengan leluasa melakukan korupsi. Kedua, mendorong berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam hal ini, terlihat bahwa semangat reformasi adalah untuk menghapuskan praktik KKN.

Semangat reformasi harus selalu dibawa oleh orang Indonesia, walaupun pada kenyataannya peristiwa reformasi juga diwarnai oleh banyak sekali kejahatan, seperti pembunuhan terhadap satu keluarga dan lain sebagainya.<sup>34</sup>

### ***Keadaan Sekarang***

Dua puluh tahun setelah reformasi terjadi, ada beberapa hal yang tampak di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi masih kerap disalahgunakan dan interpretasinya yang bersifat diskriminatif, seperti interpretasi Pancasila yang mendiskreditkan agama-agama tertentu. Dalam hal demokrasi, pemilu dan lain sebagainya berjalan dengan baik yang dibuktikan pergantian Presiden yang sesuai

---

<sup>33</sup> Ibid., 289.

<sup>34</sup> Ibid., 286.

dengan masa jabatan dan hasil pemilihan umum. Namun demikian, demokrasi di Indonesia dinilai memiliki kelemahan. Demokrasi di Indonesia diragukan pada tahun 2020 dengan pengesahan *Omnibus Law* dan lain sebagainya. Selain itu, demokrasi di Indonesia dinilai tidak memberikan *power* kepada beberapa kelompok.<sup>35</sup> Lalu, demokrasi di Indonesia juga dinilai bersifat plutokrasi yaitu dipegang dan dimanipulasi oleh beberapa oknum.

Pelanggaran HAM masih terjadi dalam dua puluh tahun pascareformasi. Kasus-kasus pelanggaran HAM belum diselesaikan dan pelanggaran HAM sendiri dinilai masih terjadi.<sup>36</sup> Dalam hal praktik KKN, praktik KKN di Indonesia masih merajalela. Contoh nyatanya adalah tertangkapnya empat puluh satu dari empat puluh lima anggota DPRD. Pemberantasan korupsi dihambat dengan berbagai hal, seperti struktur, instrumen dan lain sebagainya.<sup>37</sup> Kondisi ini membuat cukup banyak orang bersikap apatis terhadap Indonesia, termasuk orang-orang Kristen di Indonesia.

### **Pembacaan Alkitab dari Kondisi yang Indonesia**

Dari pembahasan tampak bahwa ada beberapa hal yang dicari pembaca Kristen Indonesia dalam pembacaan atau interpretasi mereka terhadap Alkitab khususnya teks Wahyu 21-22: 5. Pancasila harus diinterpretasikan menyelesaikan berbagai masalah yang masih terjadi di Indonesia. Setyawan mengungkapkan gagasan yang bisa diikuti. Ia menyatakan bahwa orang-orang Kristen Indonesia bukan hanya menerima ideologi tanpa sikap kritis, melainkan melakukan interpretasi yang menunjung tinggi kebaikan bangsa seperti pembebasan bagi kaum miskin, pemersatuan bangsa. Dalam hal ini, Pancasila digunakan sebagai sebuah ideologi anti-kolonial.<sup>38</sup>

Dalam membaca teks Alkitab, orang-orang Kristen Indonesia mencari ruang

---

<sup>35</sup> Arjuna Putra Aldino, "20 Tahun Reformasi: Dari Oligarki Menuju Plutokrasi," *Indo Progress*, last modified 2020, <https://indoprogress.com/2018/05/20-tahun-reformasi-dari-oligarki-menuju-plutokrasi/>.

<sup>36</sup> Ken Budha Kusumandaru, "Negara Dan HAM: Satu Perjuangan Politik," *Indo Progress*, last modified 2018, <https://indoprogress.com/2018/09/negara-dan-ham-satu-perjuangan-politik/>.

<sup>37</sup> Wicipto Setiadi, "Korupsi Di Indonesia: Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 3 (2018): 249.

<sup>38</sup> Setyawan, "Encountering State Ideology: Reading The Bible From An Indonesia Postcolonial Perspective." 107.

untuk menggemakan demokrasi di Indonesia dengan melibatkan semakin banyak orang dalam jalannya pemerintahan untuk mencapai kebaikan bagi seluruh rakyat. Dalam membaca teks Alkitab, orang-orang Kristen Indonesia mencari ruang untuk menyikapi pelbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia untuk menciptakan negara atau bangsa yang semakin menunjung Hak Asasi Manusia. Dalam menyikapi praktik KKN, orang-orang Kristen Indonesia saat membaca Alkitab berusaha untuk mencari sikap atau pembacaan yang menyikapi hal ini.

Dari beberapa ciri pembacaan tersebut, eskatologi Wahyu 21 dari perspektif Indonesia mencakup sikap atau sebuah penggambaran terhadap ketiga ciri pembacaan yang telah disebutkan di atas. Dalam hal ini, eskatologi ini memberikan harapan dan sikap bagi orang-orang Kristen di Indonesia.

### **Kategori dalam Membaca Wahyu 21 dari Perspektif Indonesia**

Menurut penulis, kategori yang dipakai oleh Moore sangatlah baik dan cocok bagi keadaan Indonesia dan bagi orang-orang Kristen Indonesia. Kategori tersebut ialah *The New Metropolis City*.<sup>39</sup> Kategori Moore sangat baik dan cocok setidaknya karena dua hal. Pertama, gambaran ini merujuk pada suatu kondisi yang baru, cocok dengan reformasi yang sebuah perbaikan yang terus-menerus. Kedua, *The New Metropolis* melukiskan keadaan yang kontras atau antitesis terhadap keadaan Romawi yang dianggap jahat.<sup>40</sup>

Selain cocok dengan kondisi di Indonesia, kategori *The New Metropolis* juga cocok dengan keadaan kepenulisan kitab Wahyu, sehingga membaca dengan kategori ini tidak bersifat anakronistik. Hal ini dikarenakan orang-orang Kristen mula-mula memang melakukan oposisi terhadap imperial Romawi.

Di dalam kategori *Metropolis City*, terdapat beberapa hal penting. Pertama seperti yang diungkapkan oleh Moore bahwa teks Wahyu 21: 22: 5 yang termasuk di dalam *New Metropolis City* yang bertentangan dengan atau antitesis dari kerajaan Romawi atau Imperial Romawi yang jahat. Kejahatan tersebut menurut penulis merupakan usaha-usaha penindasan dan imperial Romawi. Usaha-usaha tersebut disebutkan juga oleh Moore di dalam tafsiran Poskolonialnya terhadap kitab Wahyu.

---

<sup>39</sup> Moore, "The Revelation to John." 439.

<sup>40</sup> Ibid. 438.

Usaha-usaha tersebut mencakup hegemoni, mimikri dan kultus Imperial Romawi. Mengultuskan para kaisar yang menguasai Imperial Romawi.

Hegemoni adalah pengaturan yang dilakukan oleh kolonial atau penindas terhadap para tertindas agar para kolonial bisa mempertahankan dirinya. Hal ini dilakukan dengan memberikan sistem yang memaksa orang-orang tertindas untuk mengikuti sistem tersebut agar tidak mengalami penderitaan, seperti ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Dalam hal ini, kekuasaan imperial Romawi memberikan beberapa sistem. Pertama, pembangunan kota-kota lokal harus bergantung pada penguasa Romawi di kota-kota tersebut. Kedua, orang harus memberikan banyak harta kepada Romawi agar mendapatkan banyak kemudahan dan kebaikan. Ketiga, semua warga diharuskan menyembah kaisar Romawi.<sup>41</sup>

Kemudian, mimikri adalah internalisasi budaya, kebiasaan, atau ideologi dari kolonial atau penindas untuk menggantikan budaya, kebiasaan, atau ideologi dari kaum tertindas. Imperial Romawi melakukan mimikri dengan melakukan berbagai macam kebijakan. Hal ini terbukti dengan kitab Wahyu yang mengalami sebuah pencampuran budaya dengan budaya Romawi.<sup>42</sup> Namun demikian menurut penulis, Yohanes, penulis kitab Wahyu, di dalam pencampuran budaya melakukan *cathacresis* yaitu memberikan sebuah *parody* atau penggambaran tiruan yang sifatnya menyerang dan oposisi terhadap pihak penindas.

Pengultusan kaisar Romawi adalah pemberian pemahaman kepada masyarakat bahwa kaisar Romawi adalah dewa dan memiliki sifat ilahi. Dalam hal ini, orang-orang tertindas harus menyembah kaisar. Implikasinya, orang-orang tertindas harus melakukan semua yang dikehendaki oleh kaisar karena kaisar memiliki sifat ilahi, sehingga ia adalah dewa. Dengan demikian, orang-orang Kristen harus mengikuti kaisar sekalipun bertentangan dengan nilai-nilai Kristen seperti monoteisme, keadilan, kasih, dan lain sebagainya.

Wahyu 21 yaitu *New Metropolis City* merupakan penggambaran kontras dari imperial Romawi yang telah dijelaskan. Penjelasan kontras dari imperial Romawi dijelaskan lebih lanjut di bagian eksegeze singkat.

---

<sup>41</sup> Ibid. 439.

<sup>42</sup> Ibid. 441.

### **Eksegese Singkat Wahyu 21-22: 5**

Wahyu 21 dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu ayat 1-8 tentang keadaan baru di bumi. Lalu, ayat 9-22:5 yang menjelaskan tentang Yerusalem yang baru.<sup>43</sup> Pada bagian pertama, penulis berpendapat bahwa bagian ini menunjukkan dua hal penting pertama di ayat 1-3 tentang langit dan bumi yang baru dengan kedatangan kehadiran Allah di dalam Yerusalem, dan di ayat 4-8 Allah memberikan penghargaan, kutuk kepada manusia dengan setimpal serta menghilangkan segala penderitaan. Dalam hal langit dan bumi dengan kehadiran Allah di kemah suci, Allah secara sempurna memulihkan dunia yang berdosa, yang penuh dengan ketidakadilan, menjadi bumi yang diisi dengan kehendak Allah secara penuh; dan Allah hadir di dalam-Nya. Hal kedua, Allah menghilangkan segala keburukan dari bumi yang berdosa. Allah hadir di bumi di kerajaan-Nya dengan menghapus segala penderitaan manusia dan kejahatan.<sup>44</sup> Selain itu, Yesus akan menghakimi orang-orang sesuai dengan perbuatannya. Perbuatan pertama adalah orang yang menang, dan kedua adalah orang-orang yang dihukum. Orang yang menang adalah mereka yang tidak kalah dari penyiksaan Romawi dan tidak mengikuti dosa-dosa mereka,<sup>45</sup> sedangkan orang-orang kategori kedua menurut penulis adalah orang-orang yang mengikuti dosa-dosa Romawi dan orang Romawi itu sendiri, karena kontras terhadap orang-orang yang menang.

Dibandingkan dengan *New Metropolis City*, teks ini menunjukkan beberapa hal. Pertama, langit dan bumi baru merupakan sebuah kondisi tanpa imperial Romawi yang jahat, sehingga penindasan imperial Romawi seperti hegemoni, mimikri dan kultus imperial diakhiri oleh Allah dan diganti dengan kondisi pemerintahan Allah yang penuh keadilan dan lain sebagainya. Kedua, kondisi tanpa Romawi tersebut adalah kondisi yang tanpa penderitaan dan penuh keadilan yang diberikan kepada mereka yang tidak kalah dari Romawi, namun Romawi dan

---

<sup>43</sup> Aune, *Revelation 17-22*. 1108, 1133.

<sup>44</sup> *Ibid.* 1108.

mereka yang kalah akan mendapatkan penghukuman yang setimpal.

Bagian yang kedua menjelaskan tentang Yerusalem baru. Menurut penulis, Wahyu 21:9-22:5 menjelaskan dua fakta penting. Pertama, perkawinan antara Anak Domba dengan jemaat. Kedua, penjelasan mengenai Yerusalem. Ketiga, kehadiran Allah di Yerusalem baru.

Perkawinan antara Anak Domba dengan jemaat menggambarkan orang-orang yang menang, mereka adalah orang-orang yang tidak ikut dan kalah terhadap dosa Romawi.<sup>46</sup> Lalu, ayat 11-21, 25-27, 22:1-2 menyatakan struktur kota Yerusalem baru. DeSilva menyatakan bahwa kota Yerusalem adalah kota orang-orang kudus yang kontras terhadap kerajaan yang jahat.<sup>47</sup> Selain itu, fakta terakhir yang menarik ada di ayat 23-24, 22:3-5 yang menyatakan bahwa Allah dan Yesus menjadi terang bagi umat-Nya, sehingga tidak perlu ada matahari, dan bait suci. Dalam hal ini, DeSilva menyatakan bahwa Allah memerintah secara penuh di dalam Yerusalem baru. Keadilan-Nya, kasih-Nya, kekudusan-Nya sangat penuh di Yerusalem.<sup>48</sup>

Jika dikaitkan dengan poskolonial dan usaha-usaha penindasan yang dilakukan oleh imperial Romawi, maka ada beberapa hal yang perlu dicatat. Pertama, orang-orang yang tetap kuat menghadapi hegemoni, mimikri, dan kultur imperial akan hidup di Yerusalem baru. Kedua, orang-orang yang melakukan hegemoni, mimikri, kultus imperial tidak ada di Yerusalem baru, begitu juga dengan kondisi-kondisi hegemoni, mimikri dan kultus imperial juga tidak ada di Yerusalem baru. Ketiga, kehendak Allah begitu nyata di hari akhir.

### **Eskatologi Perspektif Poskolonial Indonesia Wahyu 21-22:5**

Dari pembahasan di atas yang sesuai dengan langkah-langkah yang dijelaskan di dalam metode penelitian, maka eskatologi Indonesia dari Wahyu 21-22:5 menyangkut beberapa hal. Pertama, eskatologi Indonesia mencakup keadaan buruk yang akan diubah menjadi keadaan yang baik. Dalam memaknai

---

<sup>46</sup> Aune, *Revelation 17-22*. 1187.

<sup>47</sup> David DeSilva, *Seeing Things John's Way: The Rhetoric of the Book of Revelation* (Kentucky: Westminster John Knox Press, 2009). 347.

<sup>48</sup> *Ibid.* 347.

eskatologi, orang-orang Kristen percaya bahwa keadaan-keadaan seperti pelanggaran HAM, praktik KKN akan dihilangkan menjadi keadaan yang sejahtera. Dengan demikian, ruang dan sikap orang-orang Kristen (orang-orang Kristen dalam membaca Alkitab melakukan hal ini) diisi oleh pemahaman eskatologi bahwa KKN dan pelanggaran HAM akan hilang, sehingga orang Kristen mempunyai pengharapan untuk berperan dalam pemberantasannya. Perubahan tersebut mencakup hegemoni dan mimikri yaitu sistem yang mengkondisikan KKN dan HAM terjadi juga diubah menjadi kondisi yang baik. Selain itu, interpretasi Pancasila akhirnya didasarkan pada pemahaman bahwa Allah akan mengubah kondisi yang buruk menjadi baik.

Kedua, Allah akan membawa keadilan bagi orang-orang yang tidak mengikuti praktik-praktik politik yang salah di Indonesia dan mengadili orang-orang yang melakukannya. Dengan demikian, orang-orang yang melakukan praktik KKN dan pelanggaran HAM akan diadili, walaupun dalam kondisi sekarang sangatlah sulit. Selain itu, orang-orang yang tidak melakukannya akan diangkat oleh Allah sehingga orang-orang Kristen memiliki sikap berani dalam berdemokrasi. Hal yang lain ialah interpretasi Pancasila membawa keadilan bagi semua orang.

Ketiga, Allah memerintah secara total di dalam dunia. Dengan demikian, Pancasila harus diinterpretasikan dalam kerangka kehendak-kehendak Allah seperti kasih, keadilan dan lain sebagainya. Praktik KKN dan pelanggaran HAM akan digantikan dengan kehendak Allah, sehingga orang-orang juga turut terlibat dalam penyelesaian praktik ini, karena Allah pada akhirnya memulihkan keadaan tersebut. Dalam hal demokrasi, orang-orang Kristen juga terlibat dengan mengutamakan teokrasi yaitu kehendak Allah menjadi utama seperti kasih, keadilan dan lain sebagainya.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Dari tulisan ini, dapat disimpulkan bahwa ada eskatologi khas Indonesia yang didasarkan pada pembacaan Poskolonial terhadap Wahyu 21: 22: 5 yang memberikan pengharapan bahwa korupsi, kesewenang-wenangan dan lain sebagainya akan berakhir dengan datangnya damai sejahtera. Penulis juga merekomendasikan beberapa hal. Pertama, perlu ditingkatkan pembacaan teks

dalam konteks Indonesia ditingkatkan untuk mendukung misi gereja. Kedua, umat Kristen di Indonesia membaca Alkitab secara otentik dalam kerangka pikir khas Indonesia dan tidak hanya meniru penafsiran Barat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aldino, Arjuna Putra. "20 Tahun Reformasi: Dari Oligarki Menuju Plutokrasi." *Indo Progress*. Last modified 2020. <https://indoprogress.com/2018/05/20-tahun-reformasi-dari-oligarki-menuju-plutokrasi/>.
- Aspinall, Edward. *Opposing Suharto: Compromise, Resistance and Regime Change in Indonesia*. California: Stanford University Press, 2005.
- Aune, David E. *Revelation 17-22*. Word Bibli. Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1998.
- Bourchier, David, and Vedi R Hadiz. *Indonesian Politics and Society: A Reader*. New York: RoutledgeCurzon, 2003.
- Brown, Colin. *A Short History of Indonesia: The Unlikely Nation?* Crow Nest: Allen & Unwin, 2003.
- Chung, Yonghan. "A Postcolonial Reading of The Great Commision (Matt 28:16-20) with a Korean Myth." *Theology Today* 72, no. 3 (2015): 276–289.
- DeSilva, David. *Seeing Things John's Way: The Rhetoric of the Book of Revelation*. Kentucky: Wesminster John Knox Press, 2009.
- Dodd, C. H. *The Parables of the Kingdom*. London: The Religious Book Club, 1935.
- Edwards, Dennis R. "Hermeneutics and Exegesis." In *The State of New Testament Studies: A Survey of Recent Research*, edited by Scott Mcknight and Nijay K Gupta, 63–82. Michigan, 2019.
- Geoff, Simons. *Indonesia: The Long Oppresion*. New York: St. Martin Press, 2000.
- Hadi, Dwi Gahyono, and Gayung Kusuma. "Propaganda Orde Baru 1966-1980." *Verleden* 1, no. 1 (2012): 40–51.
- Hutabarat, Haleluya Timbo. "Pesan Suci Yang Terkontaminasi: Suatu Tinjauan Atas Pendekatan Pascakolonial Sugirtharajah Dan Konteks Indonesia." *Gema Teologika: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian* 5, no. 2 (2020): 187–206.
- Kusumandaru, Ken Budha. "Negara Dan HAM: Satu Perjuangan Politik." *Indo Progress*. Last modified 2018. <https://indoprogress.com/2018/09/negara->

- dan-ham-satu-perjuangan-politik/.
- Mitchel, Paul. "New Testament Eschatologies." In *The State of New Testament Studies: A Survey of Recent Research*, edited by Scott L Mcknight and Nijay K Gupta, 224–272. Michigan: Baker Academic, 2019.
- Moltmann, Jurgen. *Theology of Hope: On the Ground and the Implications of a Christian Eschatology*. Edited by James W Leitch. New York: Harper & Row Publishers, 1977.
- Moore, Stephen D. "The Revelation to John." In *A Postcolonial Commentary on the New Testament Writings*, 436. New York: T&T Clark, 2009.
- Pitre, Brant. *Jesus, the Tribulation and the End of Exile: Restoration Eschatology and the Origins of the Atonement*. Tubingen: Mohr Siebeck, 2005.
- Setiadi, Wicipto. "Korupsi Di Indonesia: Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 3 (2018): 249–262.
- Setyawan, Yusak B. "'TUHAN YESUS KRISTUS' Sebagai Diskursus Politik: Suatu Perspektif Poskolonial Terhadap Pernyataan Tuhan Yesus Kristus Dalam Kitab Efesus." *Waskita: Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 4, no. 1 (2012): 1–14.
- . "Encountering State Ideology: Reading The Bible From An Indonesia Postcolonial Perspective." In *Colonial Contexts and Postcolonial Theologies*, edited by M Brett and J Havea, 99–112. Macmillan: Pargrave, 2014.
- Singgih, Emmanuel Gerrit. *Iman Dan Politik Dalam Era Reformasi Di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000.
- Wijanarko, Robertus. "Poskolonialisme Dan Teologi Kontekstual Di Indonesia." In *Berteologi Baru Untuk Indonesia*, 51–59. Yogyakarta: PT Kanisius, 2020.
- Wright, Nicholas Thomas. *Paul and the Faithfulness of God: Part III and IV*. London: Fortress Press, 2013.